



# LKPP Cegah Korupsi Pengadaan Barang

JOGJA, BERNAS -- Pengadaan barang atau jasa di Indonesia kerap menjadi lahan basah untuk korupsi, salah satunya adalah proyek e-KTP.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo di sela-sela Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia di Hotel Tentrem Yogyakarta, Selasa (25/7).

Agus Prabowo menilai belakangan ini sudah terjadi pergeseran pola korupsi di Indonesia, termasuk dalam pengadaan barang. Ia berpendapat, korupsi yang dulu terjadi di hilir sekarang sudah terjadi di hulu. "Dulu korupsi itu terjadi di tingkat eksekusi

pengadaan, sekarang ke hulu, sejak di DPR sudah terjadi korupsi," kata Agus.

Korupsi, menurut Agus, sudah terjadi sebelum ada pengadaan, walau secara mekanisme dan kinerja pengadaan di Indonesia sudah bisa dibilang lebih baik. Karena itu, ia menekankan agar LKPP miliki tugas menekan satu dari dua komponen pendorong korupsi, niat dan kesempatan, dengan mempersempit kesempatan korupsinya.

"Cara terbaik yang bisa dilakukan yaitu dengan membuka setransparan mungkin, sehingga yang harus dikalahkan bukan lagi kesempatan melainkan niat politikus-

nya," kata Agus.

Ia mengatakan bila proses pengadaan di Indonesia dibuka setransparan mungkin, pasti korupsi akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. "Mekanisme sudah lebih baik, tinggal niat politikusnya. Dan kalau semua proses transparan, pasti korupsi berkurang," ujar Agus.

Menurut Agus, yang masih menjadi masalah adalah tender-tender yang terjadi dalam pengadaan barang atau jasa di Indonesia. Menurut Agus, tender itu sendiri memang tidak atau belum bisa dihilangkan, mengingat banyak barang yang belum ada di pasar Indonesia. "Un-

tuk pengadaan yang sifatnya custom, ya masih perlu tender," kata Agus.

Ia mengambil contoh untuk pengadaan jembatan. Karena tak ada yang menjual jembatan jadi, maka pengadaan tersebut butuh tender.

"Namun untuk barang yang spesifikasinya jelas, kami sudah menyediakan e-katalog, sehingga ke depan semua transaksi pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan," kata Agus.

Sementara itu, Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta meluncurkan program perlindungan hukum pengadaan barang dan jasa sebagai upaya memberikan rasa



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005